

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Audit**

##### **2.1.1 Pengertian Audit**

Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Mulanya audit hanya bertujuan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan pada suatu laporan keuangan perusahaan, kini berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu factor dalam pengambilan keputusan oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Audit merupakan alat manajemen yang akan digunakan untuk memverifikasi bukti transaksi ekonomi, untuk menilai seberapa berhasil proses dalam suatu perusahaan telah dilaksanakan, untuk menilai efektivitas pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain itu untuk kepentingan organisasi, audit tidak hanya melaporkan ketidaksesuaian dan tindakan korektif, namun juga mengamati praktek dan aktivitas usaha yang dijalankan. Dimana dalam proses mengaudit dilakukan oleh tenaga profesional dan independen atau tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan yang terkait, sehingga diharapkan bahwa penilaiannya objektif.

Auditing itu analitis dan tidak konstruktif, dia kritis, juga menyelidik. Auditing menekankan bukti pendukung laporan dan data finansial. Untuk melaksanakan proses audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan

sejumlah standard (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut

pengertian auditing adalah “ suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Agoes (2014:4)”

Ada beberapa hal yang penting dari pengertian tersebut, untuk dibahas lebih lanjut.

**Pertama**, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan catatan pembukuan dan bukti bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri atas laporan posisi keuangan ( neraca ), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan – catatan pembukuan terdiri atas buku harian (buku/kasbank, buku penjualan, buku pembelian, buku serba serbi) buku besar, sub buku besar ( piutang, *liabilitas*, aset tetap, kartu persediaan ).

Bukti-bukti pendukung antara lain bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank, faktur penjualan, journal voucher dan lain lain. Dokumen lain yang perlu diperiksa adalah notulen rapat direksi dan pemegang saham, akta pendirian, kontrak, perjanjian kredit dan lain lain.

**Laporan posisi keuangan** (*statement of financial position*) adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan (berapa aset, liabilitas dan ekuitas) pada suatu saat tertentu.

**Laporan laba rugi komprehensif** (*statement of comprehensive income*) adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan secara keseluruhan (berapa pendapatan, beban dan laba rugi) untuk suatu periode tertentu.

**Laporan perubahan ekuitas** (*Change in equity*) adalah suatu laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas (beberapa retained earning awal, laba rugi, pembagian deviden dan retained earnings akhir) untuk suatu periode tertentu.

**Laporan Arus kas** (*Cash Flow Statement*) adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas (arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas) selama suatu periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pembelanjaan. perlu diperhatikan bahwa laporan keuangan disusun oleh manajemen, dan manajemen bertanggung atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Akuntan public bertugas untuk memeriksa laporan keuangan tersebut dan bertanggung jawab atas opini (pendapat) yang diberikannya atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

**Kedua**, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan public berpedoman pada standard profesionali akuntan public di ( *USA: Generally Accepted Auditing Standards* ), mentaati kode etik IAI dan Aturan Etika Profesi akuntan public serta mematuhi standard pengendalian Mutu.

Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, akuntan public harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai, dengan membuat apa yang disebut rencana pemeriksaan (*Audit Plan*). Dalam audit plan antara lain dicantumkan kapan pemeriksaan dimulai, berapa lama jangka waktu

pemeriksaan di perkirakan, kapan laporan harus selesai, berapa orang audit staff yang ditugaskan, masalah masalah yang diperkirakan akan dihadapi di bidang auditing, akuntansi (*accounting*), perpajakan dan lain-lain. Selain itu dalam *audit plan*. Akuntansi public harus menetapkan batas materialitas dan memperhitungkan risiko audit.

Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis, pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan (*registered accountant*), sertifikasi CPA dan mempunyai izin praktik sebagai akuntan public dan Menteri keuangan, pelaksana pemeriksaan haruslah seorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman dan keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntan.

Kalau akuntan public dan audit staffnya tidak mempunyai keahlian tersebut, tidak mungkin pemeriksaan dilakukan secara kritis (cermat, hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan kemungkinan terjadinya penyimpangan, salah saji material atau kesalahan.)

**Ketiga**, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan public. Akuntan public harus independen, dalam arti, sebagai pihak diluar perusahaan yang diperiksa, tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut (misal, sebagai pemegang saham, direksi atau dewan komisaris), atau mempunyai hubungan khusus (misal keluarga dari pemegang saham, direksi atau dewan komisaris). Akuntan public harus independen, baik *in-fact* maupun *in-appearance* dan *in-mind* karena sebagai orang kepercayaan masyarakat, harus bekerja secara objektif, tidak memihak ke pihak manapun dan melaporkan apa adanya.

**Keempat**, tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan kewajaran mengenai laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan standart akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia: standart akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan dimodifikasi dalam standar akuntansi keuangan, di USA: *Generally Accepted Accounting Principles*), diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung masalah yang material (besar dan signifikan). Akuntan public tidak menyatakan bahwa laporan keuangan itu benar, karena pemeriksaannya dilakukan secara *sampling* (test basa) sehingga mungkin saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tetapi jumlahnya tidak material (kecil dan *immaterial*) sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Untuk perusahaan kecil dan menengah bisa memuilih menggunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) atau PSAK sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya, sedangkan untuk perusahaan besar dan *public company* harus menggunakan PSAK dan mulai tahun 2012 menggunakan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang pemiliknya adalah para pemegang saham, biasanya setahun sekali dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) para pemegang saham akan meminta pertanggung jawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena :

- a. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.
- b. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bias yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS)
- c. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total assetnya Rp. 25 Milyar ke atas harus memasukkan *audited financial statements nya ke departemen perdagangan dan perindustrian*.
- d. Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukkan *audited financial statements*-nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku.
- e. SPT yang di dukung oleh *audited dinancial statements* lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.

Menurut PSAK pengertian auditing adalah “suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian dan melihat bagaimana tingkat hubungan antara poenyataan atau asersi dengan kenyataan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

### 2.1.2 Jenis Jenis Audit

pengauditan dibagi dalam beberapa jenis, pembagian tersebut dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. (agoes 2014:10-11). Sehingga jenis audit dapat dibedakan menjadi :

1. *General Audit* (Pemeriksaan Umum)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan public independen terhadap suatu laporan keuangan perusahaan dimana bertujuan untuk memberikan pendapat atau opini kewajaran terhadap laporan keuangan tersebut, tentu saja sesuai dengan aturan etika KAP yang telah sesuai dengan aturan etika KAP yang telah disahkan oleh ikatan akuntan Indonesia.

2. *Special Audit* (Pemeriksaan khusus)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan public professional yang hanya terbatas pemeriksaannya (sesuai dengan permintaan pihak yang ingin di audit), dimana pada akhirnya auditor tidak perlu memberikan opini atau pendapat kewajaran terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Hanya pos-pos tertentu saja yang membutuhkan pendapat karena prosedur yang dilakukan oleh auditor pun terbatas ruang lingkupnya.

3. *Audit Investigasi*

Audit investigasi semakin berkembang terutama dalam hal penelitian kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum dan pidana, misalnya korupsi dan pencucian uang. Sebenarnya audit investigasi lazim terjadi pada pergantian pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pengurus bawu

bahwa tidak ada beban atau tagihan yang mungkin timbul dari periode sebelumnya.

### 2.1.3 Bukti Audit

Terdapat 8 jenis bukti audit dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari delapan kategori bukti yang luas, yang disebut sebagai *jenis-jenis bukti* (Arens 2014:212-218). Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis-jenis bukti berikut :

1. *Physical Examination* (Pemeriksaan fisik)

Adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas *aktiva atau aset yang tak berwujud*. Jenis bukti ini paling sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud.

2. *Confirmation* (Konfirmasi)

Menggambarkan penerimaan *respon tertulis langsung* dari *pihak ketiga yang independen* yang memverifikasi keakuratan informasi yang *diminta oleh auditor*. Responnya dapat dalam bentuk kertas atau elektronik atau media lainnya seperti akses langsung auditor ke informasi yang dimiliki pihak ketiga. Permintaan ini ditujukan kepada klien, dan klien meminta pihak ketiga untuk meresponnya secara langsung kepada auditor. Karena konfirmasi berasal dari sumber pihak ketiga alih – alih klien, jenis bukti audit ini sangat dipercaya dan merupakan jenis bukti audit yang sering digunakan.

3. *Inspection* (Inspeksi)

Adalah pemeriksaan oleh auditor atas *dokumen dan catatan klien* untuk mendukung informasi yang tersaji, atau seharusnya tersaji, dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksana bisnis dengan cara terorganisir, yang bias juga dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, atau media lain.

4. *Analytical procedures* (Prosedur Analitis)

Terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh auditor dapat membandingkan presentase margin kotor tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Prosedur analitis telah digunakan secara luas dalam praktik, dan *dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit*.

5. *Inquiry* (Tanya Jawab atau Wawancara)

Adalah upaya untuk memperoleh informasi secara *lisan* maupun *tertulis* dari klien sebagai respon atas pernyataan yang diajukan auditor. Walaupun banyak bukti yang diperoleh dari klien melalui Tanya-jawab ini, bukti itu biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen dan mungkin mendukung pihak klien. Karena itu, apabila auditor memperoleh bukti melalui Tanya-jawab biasanya auditor juga perlu memperoleh bukti pendukung melalui prosedur lainnya.

6. *Recalculation* (Rekalkulasi)

Melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar dimuka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak audit dengan bantuan computer.

7. *Observation* (Observasi)

Terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas klien, atau mengamati para individu yang melakukan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang diserahi tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Observasi memberikan bukti mengenai pelaksanaan proses proses atau prosedur tetapi terbatas pada point point ketika observasi dilakukan.

8. *Reperformance* (Pelaksanaan ulang)

Adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien, yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Jika rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas suatu perhitungan, pelaksanaan ulang melibatkan pengecekan atas prosedur lain.

## **2.2 Tahapan Audit**

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan seorang auditor haruslah mengetahui langkah-langkah atau tahapan apa saja yang harus ditempuh untuk memenuhi tujuan audit dimana salah satu tujuan audit ialah untuk mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan.

Adapun langkah langkah atau tahapan audit yang harus dilakukan oleh auditor professional meliputi empat tahap, yakni

### **2.2.1 Penerimaan Perikatan Audit**

Perikatan adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Langkah awal dalam mengaudit suatu laporan keuangan ialah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit calon klien atau melanjutkan bahkan menghentikan perikatan audit dari klien yang berulang. Dalam perikatan perjanjian tersebut klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi professional yang dimilikinya, menurut Mulyadi (2011).

Adapun langkah langkah yang perlu ditempuh oleh auditor dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan audit dari calon kliennya terdiri dari enam unsur yaitu :

1. Mengevaluasi integritas manajemen  
Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas salah saji.
2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa  
Mengidentifikasi pemakaian laporan audit, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, serta mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit, merupakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa.
3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit  
Sebelum audit menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut.
4. Mengevaluasi independensi  
Auditor juga harus memastikan bahwa setiap profesional yang menjadi anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi tim auditnya diragukan oleh pihak yang mengetahui salah satu dari delapan golongan informasi.
5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan

Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran professional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit.

6. Membuat surat perikatan audit

Surat perikatan audit dibuat oleh auditornya untuk klien yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukkan oleh klien.

### **2.2.2 Perencanaan auditor**

Menurut mulyadi (2011), tahap keada adalah auditor menerima perikatan audit dari kliennya ialah melaksanakan audit, ada tujuh tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya.

1. Memahami bisnis dan industry klien

Pemahaman atas bisnis klien memberikan panduan penting tentang sumber informasi bagi auditor untuk memahami bisnis dan industry klien.

2. Melaksanakan prosedur audit

Mengidentifikasi perhitungan/perbandingan yang harus dilihat, menganalisa data dan mengidentifikasi perbedaan signifika, menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut, menentukan dampak hasil prosedur analitik perencanaan audit. Merupakan beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam prosedur analitik.

3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal

Ada dua tingkat yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam materialitas awal yaitu pertama, tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akan materialitas pada tingkat laporan keuangan diterapkan oleh auditor karena

pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Tingkat saldo akun pun penting karena auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun.

4. Memperhitungkan resiko bawaan

Beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam setiap tahap proses auditnya yaitu, perencanaan audit, pemahaman dan pengujian pengendalian intern, penaksiran resiko pengendalian, pelaksanaan pengujian substantive, penetapan resiko deteksi, penerbitan laporan dan yang terakhir penilaian resiko audit.

5. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama.

Auditor harus menentukan bahwa saldo awal mencerminkan penetapan kebijakan akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut ditetapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan.

6. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan

Auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit terhadap asersi individual atau golongan transaksi. Ada dua strategi yaitu *Primary substantive approach* dan *lower assessed level of control risk approach*.

7. Memahami pengendalian intern klien

Mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku merupakan langkah awal dalam memahami pengendalian intern klien, selanjutnya adalah melakukan penilaian atas efektivitas intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut.

### 2.2.3 Pelaksanaan Pengujian Audit

secara garis besar terdapat tiga golongan yang dapat dilakukan atas pelaksanaan audit oleh seorang auditor professional Mulyadi (2011), yaitu:

#### 1. Pengujian Analitik

Pengujian pada tahap awal yang dilakukan oleh auditor ialah melakukan pengujian analitik, dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami klien juga untuk menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Karena sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap objek audit, auditor harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang di audit.

#### 2. Pengujian Pengendalian

Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh seorang auditor professional untuk melakukan pengujian pengendalian yang tujuannya untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien.

#### 3. Pengujian Substantif

Pengujian substantive merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Prosedur pengujian substantive meliputi :

- a. Verifikasi atas ketepatan saldo kas
- b. Penetapan prosedur analitis
- c. Perhitungan kas yang disimpan dalam entitas
- d. Melaksanakan pengujian pisah batas atas
- e. Konfirmasi saldo simpanan pinjaman di bank
- f. Konfirmasi perjanjian atau kontrak lain dengan bank
- g. Melakukan pemindaian atau pembuatan rekonsiliasi bank
- h. Menghimpun dan menggunakan laporan pisah batas bank
- i. Melakukan pengujian pisah batas bank
- j. Mengusut transfer bank
- k. Menyiapkan pembuktian kas
- l. Membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

#### **2.2.4 Pelaporan Auditing**

Laporan hasil audit adalah salah satu tahap yang penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Karena pelaporan audit merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada auditor. Secara umum laporan auditor dapat diidentifikasi sebagai laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan keuangannya disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang diterapkan secara konsisten dengan tahun – tahun sebelumnya.

Dalam pelaporan audit, mengungkapkan semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum. Kesimpulan ini hanya akan dinyatakan bila auditor telah membentuk pendapat berdasarkan audit yang dilaksanakan sesuai dengan GAAS. Laporan standard/laporan audit baku memiliki tiga paragraph, yaitu paragraf pendahuluan/pengantar, paragraf lingkup audit, dan paragraf pendapat atau opini.

Terdapat beberapa opini yang dapat diberikan oleh seorang auditor professional berkenaan dengan suatu pemeriksaan umum. Menurut standard Professional Akuntansi (SPA 29), opini audit terdiri dari lima jenis, yaitu :

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**

Pendapat ini diberikan jika auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini diberikan apabila keadaan perusahaan sebagai berikut.

- a. Bukti audit yang dibutuhkan telah mencukupi dan auditor pun telah menjalankan semua tugas lapangannya sehinggadia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati
- b. Standard umum telah ditaati sepenuhnya dalam perikatan kerja
- c. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bnerlaku umum dan konsiten pada laporan - laporan sebelumnya
- d. Tidak terdapat ketidakastian yang cukup berarti (*non material*) mengenai perkembangan dimasa mendatang

**2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan**  
*(Modified Unqualified Opinion)*

Laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, namun ditambahkan dengan hal – hal yang memerlukan bahasa penjelasan.

**3. Opini Wajar Dengan Pengecualian** *(Qualified Opinion)*

Pendapat wajar yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada post tertentu, sehingga harus dikecualikan

**4. Opini Tidak Wajar** *(Advers Opinion)*

Pendapat tidak wajar diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan

**5. Opini Tidak Memberikan Pendapat** *(Disclimer of opinion)*

Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan jika, terdapaty banyak pembatasan ruang lingkup audit serta hubungan yang tidak independen antara auditor dan klien. Kondisi tersebut tidak memungkinkan auditor untuk dapat menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan secara keseluruhan.

## **2.3 Teori Akuntansi**

### **2.3.1 Pengertian Piutang Usaha**

Sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umnya pelanggan akan menjadi lebih tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan secara

kredit oleh perusahaan, dan hal ini rupanya juga menjadi salah satu trik bagi perusahaan untuk meningkatkan besarnya omset penjualan yang akan tampak dalam laporan laba ruginya.

piutang usaha adalah “ piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, dimana yang paling umum ialah dari perjanjian barang atau jasa secara kredit Agoes (2014:173).

Menurut Hery (2011:36) menjelaskan bahwa piutang adalah “sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan umumnya dalam bentuk kas dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel), memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel, dan piutang bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain (untuk piutang pajak)”.

Menurut Kieso, Weygandt (2011) mengungkapkan, “piutang (*receivable*) adalah klaim uang, barang, atau jasa terhadap pelanggan atau pihak – pihak lainnya”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang usaha merupakan hak atau klaim perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan.

### 2.3.2 Tujuan Audit atas Piutang Usaha

Menurut Agoes (2014:192) tujuan pemeriksaan perkiraan piutang usaha yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern (*internal control*) yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas.
2. Untuk memeriksa *validity* (keabsahan) dan *authenticity* (keotentikan) dari pada piutang.
3. Untuk memeriksa *collectability* (kemungkinan tertagihnya) piutang dan cukup tidaknya perkiraan *allowance for bad debts* (penyisihan piutang tak tertagih).
4. Untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat (*contingent liability*) yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih (*notes receivable*).
5. Untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia / Standar Akuntansi Keuangan.

### 2.3.3 Prosedur Audit atas Piutang Usaha

Prosedur audit yang dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan – bahan bukti (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Agoes menyarankan prosedur audit piutang usaha sebagai berikut :

1. Pelajari dan evaluasi pengendalian internal atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan.
2. Buat *Top Schedule* dan *Supporting Schedule* piutang tertinggal neraca.

3. Minta *aging schedule* dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan (*customer*), saldo piutang, umur piutang,serta *subsequent event*.
4. Periksa *mathematical accuracy* dan check *individual balance* ke *subledger* lalu totalnya ke *general ledger*.
5. *Test check* umur piutang dan beberapa *customer* ke *subledger* lalu totalnya ke *general ledger*.
6. Kirimkan konfirmasi piutang:
  - a. Tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi.
  - b. Tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negative.
  - c. Cantumkan nomor konfirmasi baik di *schedule* piutang maupun di surat konfirmasi.
  - d. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya.
  - e. Buat ikhtisar (*summary*) dari hasil konfirmasi.
  - f. Perikas *subsequent event* dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Perhatikan bahwa yang dicatat hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa.

- g. Periksa apakah ada wesel tyagih yang didiskontokan (potongan atas nilai jatuh tempo wesel) untuk mengetahui kemungkinan adanya *contingent liability*.
- h. Periksa dasar penentuan *allowance for bad debts* dan perikas apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan terlalu kecil.
- i. Periksa apakah barang – barang yang dijual melalui *invoice* sebelum tanggal neraca, sudah dikirm pertanggal neraca. Kalau belum, cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa, yang dibatalkan dalam periode berikutnya.
- j. Periksa notuilen rapat, surat – surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan *correspondence file* untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan.
- k. periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK)
- l. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa.